

ABSTRAK

Dian Marlina Herdianti (2020): Pengelolaan Retribusi Kawasan Industri Jababeka oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Tinjauan Siyasah Maliyah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir khususnya dari sektor industri seharusnya berbanding lurus dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dari penerimaan retribusi daerah. Namun penerimaan retribusi daerah malah cenderung menurun dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Perda No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; diharapkan mampu menjadi regulasi yang jelas dan adil serta bisa menjadi solusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bekasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah bagaimana mekanisme pemungutan dan pengelolaan dana retribusi dari Kawasan Industri Jababeka sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 kemudian bagaimana kontribusi dana retribusi dari Kawasan Industri Jababeka terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi serta bagaimana tinjauan siyasah maliyah atas pengelolaan retribusi di Kawasan Industri Jababeka oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori tanggung jawab negara yang dikembangkan oleh Muhammad Bagir Al-Shadr. Teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu (1) konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*), (2) konsep keseimbangan sosial (*at-taudzun al-ijtimai'i*), dan (3) konsep intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme pemungutan dan pengelolaan retribusi di Kawasan Jababeka menggunakan Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Perda No 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, kontribusi retribusi kawasan Jababeka tidak signifikan terhadap pendapat asli daerah (PAD) Kabupaten Bekasi, pengelolaan retribusi di Kawasan Industri Jababeka dapat dianalisis menggunakan konsep intervensi negara dan imbal balik masyarakat teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah al-daulah*) Muhammad Bagir Shadr. Berdasarkan teori tanggung jawab negara, Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki ruang terbuka kosong untuk mengatur tata kelola retribusi di Kawasan Industri Jababeka dan mengalokasikan hasilnya untuk bantuan tunai masyarakat dan pembangunan infrastruktur Kawasan.

Kata kunci: *Kawasan Industri Jababeka, Retribusi, Siyasah Maliyah.*